



PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS PEMBUKUAN SEDERHANA DI KANTOR DESA PAGAR GADING KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Erpan¹, Iis Apita Sari², Dali Permata Sari³, Loliek Kania Atmaja⁴, Jelita Zakaria⁵

¹Prodi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

²Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra

³Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu



***Corresponding author**

Email : erpan12@gmail.com

HP: 089526156569

Kata Kunci:

Keuangan,
Desa,
Pembukuan Sederhana,

Keywords: Finance,
Village,
Simple Bookkeeping.

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi yaitu mengenai pengelolaan keuangan desa dimana selama ini perangkat desa hanya membuat laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah yaitu berupa Buku Kas Umum yang berbasis single entry. Metode kegiatan dilakukan secara sosialisasi kegiatan, penyuluhan, pendampingan, demonstrasi. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini yaitu Desa Pagar Gading mempunyai suatu laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan desa tanpa harus menyewa akuntan dari luar desa tersebut.

ABSTRACT

The problem that occurs is regarding village financial management where so far village officials have only made accountability reports to the local government, namely in the form of a General Cash Book which is based on a single entry. Situation analysis: The activity method is carried out by socializing activities, counseling, mentoring, demonstrations. The results achieved in this activity are that Pagar Gading Village has a financial report that is in accordance with standards and can be used as village financial accountability without having to hire an accountant from outside the village.

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata atau KKN merupakan sebuah bentuk kegiatan pengabdian dari seorang atau sekelompok mahasiswa kepada masyarakat. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjendikti) telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kuliah kerja nyata merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk kegiatan pengalaman ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa kepada masyarakat. Kuliah kerja nyata dilaksanakan secara melembaga dan terstruktur sebagai bagian dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program studi ilmu hukum strata satu (S1) dengan status intrakurikuler wajib.

Dalam pelaksanaannya kuliah kerja nyata mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Interdisipliner, “*cross sectoral*”, dan komprehensif.
Pola pikir yang ingin dikembangkan melalui kuliah kerja nyata bagi lembaga dilandasi oleh kenyataan, bahwa hampir setiap persoalan hidup dalam masyarakat mempunyai hubungan satu dengan yang lain (*complicated*), sehingga penyelesaian dengan pola pendekatan monodisiplin kurang efektif. Kuliah kerja nyata dimaksudkan untuk pengisi kekurangan tersebut dengan memberikan pengalaman cara berfikir interdisipliner, terpadu, dan komprehensif.
2. Berdimensi luas, pragmatis, dan praktis. Kuliah kerja nyata bertolak dari fakta yang ada di masyarakat, serta timbulnya pelbagai persoalan di masyarakat perlu adanya pola pikir secara komprehensif dan pragmatis dengan pendekatan lintas ilmu, baik berdimensi eksakta maupun non eksakta, yang berteknologi maupun non teknologi. Pelbagai disiplin ini dan metode pendekatan sangat menunjang tingkat keberhasilan dalam pemecahan masalah serta pemberian solusi yang bermanfaat. Dengan pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari bangku perkuliahan diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya kepada masyarakat. Dalam kuliah kerja nyata mahasiswa didorong untuk mengadakan kegiatan di luar bidang studi dan mahasiswa dapat melakukan studi lintas disiplin ilmu dengan teman dari pelbagai fakultas lain maupun melakukan diskusi, bertukar pikiran serta pengalaman baik dengan teman maupun masyarakat tempat lokasi kuliah kerja nyata (KKN), yang hasilnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yakni mahasiswa, pemerintah dan masyarakat.
3. Keterpaduan antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang termanifestasikan dalam Tri Dharma PT.
Melalui KKN mahasiswa mengenal persoalan masyarakat yang bersifat “*cross sectoral*” serta belajar memecahkan masalah dengan pendekatan ilmu (interdisipliner). Mahasiswa perlu menelaah dan merumuskan masalah yang dihadapi masyarakat serta memberikan alternatif pemecahannya (penelitian), kemudian membantu memecahkan dan menanggulangi masalah tersebut (Akademik et al., 2021).

Program kuliah kerja nyata untuk mengoptimalkan pencapaian maksud dan tujuan perguruan tinggi, yakni :

1. Menghasilkan sarjana yang menghayati permasalahan masyarakat dan mampu

memberi solusi permasalahan secara pragmatis.

2. Membentuk kepribadian mahasiswa sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang komprehensif.

Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan sebuah kegiatan pembelajaran lapangan dilakukan oleh mahasiswa, diharapkan dapat memberikan solusi tentang persoalan yang ada didalam masyarakat, mengembangkan potensi-potensi dan mengetahui kelebihan maupun kekurangan masyarakat setempat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa, memberikan pembelajaran untuk mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu mata kuliah wajib tempuh Universitas Muhammadiyah Bengkulu saat memasuki semester ganjil (*Kuliah Kerja Nyata – Universitas Kadiri, n.d.*).

Pada tahun ajaran 2020/2021 kali ini, KKN dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2014 hingga 24 September 2014 di Desa Pagar Gading Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Bertepatan dengan masuknya bulan keberdekaan. Rombongan KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan jumlah siswa 254 mahasiswa dibagi menjadi 30 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 8 hingga 9 mahasiswa. Masing-masing kelompok ini tersebar ke dalam 30 desa di Desa Pagar Gading Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (*Unmuhbengkulu.Net, n.d.*).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Suatu bentuk kegiatan pembelajaran lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor 2006/IT6.1/PP/2011. Pelaksanaan kuliah demikian, diharapkan dapat meningkatkan empati mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Sebagai kegiatan intra kulikuler, KKN merupakan bagian integral dari kurikulum program studi yang diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan sosial. Sebagai bagian dari sivitas akademik, baik secara pribadi maupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung, mahasiswa harus mampu menjaga citra institusi.

Oleh karena itu, dalam upaya membantu memecahkan permasalahan yang ada, perlu mengedepankan etika akademik, nilai dan norma serta etika sosial di masyarakat. Menjunjung tinggi pluralitas dan toleransi terhadap berbagai perbedaan di lokasi KKN. Mengedepankan kebersamaan dan kerukunan dalam setiap upaya perbaikan yang dilakukan. Pada tahun ajaran 2022/2023 ini penulis laporan ditempatkan di Desa Pagar Gading Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wilayah kegiatan Studi Lapangan.

Desa Pagar Gading merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Pino raya kabupaten Bengkulu Selatan provinsi Bengkulu 4°20'56.6"S 102°54'12.9"E dengan luas wilayah 9.000 Ha. Sedangkan batas wilayah Dusun Bajol dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara : Desa Kembang Seri

2. Sebelah Timur : Desa Bandar Agung
3. Sebelah Selatan : Dusun Suka Bandung
4. Sebelah Barat : Desa Telaga Dalam Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2022, jumlah penduduk Desa Pagar Gading adalah terdiri dari 416 KK, dengan jumlah total 1.334 jiwa, dengan rincian 645 laki-laki dan 685 perempuan. Seluruh penduduk menganut kepercayaan agama islam. Kegiatan keagamaan di Desa Pagar Gading sangat maju karena seua penduduk beragama Islam. Hal ini juga terlihat dari aktifnya kegiatan keagamaan di masjid-masjid dan mushola. Kegiatan keagamaan di Desa Pagar Gading meliputi: pengajian rutin, pengajian remaja, dsb. Mata pencaharian Desa Pagar gading sebagian besar masyarakat adalah buruh, peternak dan petani. Adapun mengenai infrastruktur yang sudah ada di desa Pagar Gading, yaitu; kantor desa, gedung sekolah SD dan SMP dan masjid.

Desa Pagar Gading dipimpin oleh seorang kepala desa disamping itu juga samping itu terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan disegani di Desa Pagar Gading, utamanya tokoh agama. Untuk kegiatan administrasi yaitu urusan pemerintahan desa diatur oleh aparat desa termasuk mengenai keuangan desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dasar hukum keuangan desa, yaitu;

1. UU 6/2014
2. PP 43 2014 Jo PP 47/2015 Jo PP 11/2019
3. PP 60 2014 Jo PP 22 2015 Jo PP 8 2016
4. Permendagri 114/2014
5. Permendagri 44/2017
6. Permendagri 20/2018
7. Perda 4/2014 Jo Perda Nomor Tahun2019
8. Perbub Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa : 64/2018---DRAFT
9. Perbub Penatausahaan Keuangan Desa :21/2018---draft
10. Perbub 11/2019 Daftar KewenanganDesa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas, merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Asas pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif
4. Tertib
5. Disiplin anggaran

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

Perencanaan keuangan desa sendiri, yaitu: Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan (Astini et al., 2019). Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi mengenai penjabaran APB Desa. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Struktur APDES sendiri terdiri dari:

1. Pendapatan desa
2. Belanja desa
3. Pembiayaan

Klasifikasi pendapatan desa, yaitu:

1. Pendapatan asli desa
2. Pendapatan transfer
3. Pendapatan lain-lain

Alokasi belanja desa berdasarkan PP 43/2014 JO PP 47/2015 70 % untuk mendanai: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, operasional rukun tetangga dan rukun warga. Berdasarkan PP 11/2019 70% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan operasional rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dan tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang

ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa sebagaimana dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas : Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, Rencana Anggaran Biaya (Istiqomah, 2015).

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa. Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti sebagaimana dimaksud mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Salah satu tujuan Laporan keuangan Desa disusun yaitu dalam rangka menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola dan/atau dipercayakan kepada Pemerintah Desa. Manfaat pentingnya pelaporan keuangan bagi Desa, diantaranya:

1. Mengetahui tingkat efektifitas, efisiensi dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh Desa dalam 1 tahun anggaran.
2. Nilai kekayaan bersih yang dimiliki Desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan akan dapat diketahui secara akurat.
3. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa utamanya Kepala Desa yang lebih informatif.
4. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber – sumber ekonomi yang dimiliki Desa.
5. Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yang

diamanatkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan model praktis bagi entitas lain.

Salah satu alokasi desa yang paling besar yaitu mengenai APBN. Alokasi APBN yang diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggung jawaban dari desa. Desa Pagar Gading Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan selama ini telah membuat laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah yaitu berupa Buku Kas Umum yang berbasis single entry. Namun, pertanyaannya disini apakah cukup hanya dengan Buku Kas Umum yang berbasis single entry saat alokasi APBN 10% mulai diberikan kepada desa-desa. Hal tersebut yang menjadi permasalahan di kemudian hari. Pertama, permasalahan yang muncul yaitu tidak adanya standar pelaporan keuangan di desa. Kedua, standar tersebut tidak dapat dijalankan jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi (*Pemerintahan Desa Pdf 58660 | Kelola Keuangan Desa 2019 Dikonversi*, n.d.).

Untuk menjawab permasalahan tersebut tim KKN membuat program mengajarkan pembukuan akuntansi untuk pembukuan gampong. Hal ini sangat dibutuhkan sebuah laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar yang berlaku. Standar ini diperlukan agar desa dapat membuat pelaporan pertanggung jawaban kepada pemerintah yang tidak hanya berupa Buku Kas Umum yang berbasis single entry. Dalam hal ini bukan berarti Buku Kas Umum dihapuskan. Tetapi Buku Kas Umum tetap ada tetapi diubah menjadi berbasis double entry. Selain itu tidak hanya Buku Kas Umum tetapi standar ini akan membantu desa dalam membuat laporan tambahan selain Buku Kas Umum. Desa Pagar Gading mempunyai suatu laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan desa tanpa harus menyewa akuntan dari luar desa tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan sederhana diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Pencatatan keuangan ini meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Kemudian bisa ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada periode tersebut. Jenis Pembukuan Sederhana dalam Laporan Keuangan.

1. Pembukuan inventasi barang

Ada beberapa manfaat dari pencatatan inventaris barang ini, yaitu:

- Mempermudah pengawasan aset.
- Menjaga atau mencegah barang agar tidak mudah hilang.
- Meringankan beban untuk melakukan pengecekan barang.
- Mempermudah kegiatan mutasi atau penghapusan barang.
- Bentuk pertanggungjawaban dengan memiliki bukti tertulis terhadap pengelolaan barang.

2. Pembukuan catatan KASBuku kas ini, merupakan gabungan catatan antara transaksi pengeluaran dan pemasukan.

3. Pembukuan Persediaan

Pembukuan atau pencatatan persediaan ini juga bisa kamu gunakan untuk

menghindari kecurangan.

Manfaat adanya laporan pembukuan ini dapat dirasakan oleh perangkat internal perangkat desa. Adapun manfaatnya, yaitu;

1. Memberikan informasi tentang Kondisi Keuangan
Manfaat Laporan Keuangan untuk Pihak Internal adalah untuk melihat aktivitas operasional apakah sudah berjalan baik atau belum.
2. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Manfaat Laporan Keuangan untuk Pihak Internal adalah sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja. Informasi keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan bisa membantu dalam penyusunan rencana kegiatan yang efektif dan efisien sesuai kondisi keuangan.
3. Sebagai Pengendali
Manfaat Laporan Keuangan yaitu membuat laporan pengendali beberapa faktor yang bisa terjadi pada masa yang akan datang.
4. Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kepada Pihak Eksternal
Manfaat Laporan Keuangan untuk Pihak Internal adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak diluar baik itu Pemerintah Desa atau masyarakat. Pihak eksternal pasti ingin melihat perkembangan keuangan desa melalui laporan keuangan.
5. Menyusun Perencanaan Kegiatan
Pencatatan transaksi keuangan menjelaskan informasi tentang kemampuan pengelola untuk mengerjakan sebuah pekerjaan atau aktivitas agar keberlangsungan dan bisa terjaga
6. Mengendalikan Anggaran
Unsur unsur laporan keuangan bisa memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang timbul pada masa yang akan datang sehingga memudahkan pihak pengelola keuangan untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya.
7. Dasar Pembuatan Keputusan
Laporan keuangan termasuk laporan arus kas akan mempermudah pihak pengelola untuk mengambil tindakan dan menyusun perencanaan yang akan ditetapkan sebagai sebuah keputusan.

Dana desa perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Jika pengawalan atau pendampingan ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan hingga pelaporannya. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa dengan mengalokasikan dana desa dalam APBD yang bersumber dari APBN. Akuntabilitas merupakan hal yang penting karena dengan keterbukaan informasi keuangan bagi masyarakat maka masyarakat mampu menilai kinerja perangkat desa. Desa banyak mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan oleh hasil yang menunjukkan tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum berjalan dengan baik dikarenakan

Sumber Daya. Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah. Kendala yang dialami aparat desa yaitu kurangnya sumber daya manusia yang handal dan faham mengenai pengelolaan keuangan desa.

Dari hasil survey tersebut menunjukkan masih diperlukan pembinaan dan pengawasan agar tercapai tata kelola desa yang baik. Masih banyak hambatan dalam pengelolaan keuangan desa karena belum efektifnya pelatihan para perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari aparat pemerintah desa secara berkelanjutan. Kepala Desa wajib menyampaikan informasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi Pemerintah Desa dan websitedesa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukanlah pendampingan pengelolaan keuangan berbasis pembukuan sederhana di kantor desa di desa Pagar Gading Kecamatan Pino Raya.

Analisis situasi:

1. Perangkat desa yang bertugas mengelola keuangan hanya mengetahui mengenai Buku Kas Umum yang berbasis single entry.
2. Perangkat desa yang bertugas mengelola belum bisa membuat pembukuan sederhana pengelolaan keuangan desa.

Tujuan:

1. Untuk mendampingi perangkat desa membuat pembukuan sederhana pengelolaan keuangan desa.
2. membantu desa dalam membuat laporan tambahan selain Buku Kas Umum
3. membantu supaya laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan desa tanpa harus menyewa akuntan dari luar desa tersebut.

METODE KEGIATAN

Kelompok yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan adalah perangkat desa di Desa Pagar Gading, sedangkan bentuk kegiatan dilakukan melalui pengenalan, pelatihan, praktek langsung tentang pembuatan laporan keuangan desa. Kegiatan pengabdian ini disampaikan melalui beberapa tahap sebelum kegiatan dilakukan survei awal. Tahapan berikutnya meliputi sosialisasi kegiatan, pelatihan, penyuluhan.

1. Sosialisasi kegiatan

Pada tahapan ini diarahkan untuk memberikan persamaan pemahaman mengenai maksud dan tujuan kegiatan, prosedur untuk implementasi kegiatan serta jaminan keberlanjutan dari kegiatan ini, Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh kelompok sasaran, maka langkah ini sangat diperlukan. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan kepada kelompok sasaran tentang laporan keuangan. Supaya dapat diterima dan dipahami dengan jelas maka pada tahap ini diberi kesempatan diskusi dan Tanya jawab. Waktu yang diberikan pada tahapan ini selama 1 bulan.

2. Pelatihan

Pada tahapan berikutnya pelatihan. Sama seperti pelatihan kepada mahasiswa peserta KKN, kelompok sasaran juga mendapat pelatihan karena lokasi kelompok sasaran hanya pada satu tempat maka waktu yang diperlukan tidak terlalu banyak hanya sebanyak 7 hari, dengan rincian proker yang dilakukan.

3. Penyuluhan

Pada tahap ini menyampaikan materi penyuluhan kepada kelompok sasaran, tujuan diadakannya penyuluhan untuk mengenalkan warga masyarakat Desa Pagar Gading tentang laporan keuangan, hal tersebut agar perangkat desa bisa mengetahui lebih detail bagaimana dan apa saja aturan-aturan yang ada dalam pembuatan laporan keuangan.

4. Pendampingan

Melakukan pendampingan bimbingan, pendampingan yang dilakukan adalah memberitahu perangkat desa tentang panduan atau cara membuat laporan keuangan. Paduan ini digunakan agar pihak desa mempunyai suatu laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan desa tanpa harus menyewa akuntan dari luar desa tersebut. Langkah ini merupakan hal yang paling penting karena peserta didampingi dalam penyusunan laporan keuangan desa sampai mereka paham.

5. Demontrasi

Melakukan demontrasi seperti demontrasi pembuatan laporan keuangan sederhana dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan pengetahuan baru pada perangkat desa yang bisa di praktekmembuat sendiri di rumah dan.kantor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kegiatan ini dilakukan di kantor desa Desa Pagar Gading dengan target sasaran kegiatan seluruh perangkat desa Desa Pagar Gading. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 29-30 Agustus, 12-13 September 2022 dengan total 12 jam.

Tujuan kegiatan yaitu Untuk menciptakan suatu laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku supaya dapat dipergunakan sebagai laporan keuangan desa. Manfaat kegiatan yaitu Untuk memberikan pemahaman kepada aparatur desa dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku serta sasaran kegiatan Desa Pagar Gading mempunyai suatu laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan bisa digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan desa tanpa harus menyewa akuntan dari luar desa tersebut.

Hasil kegiatan, yaitu: ada 1 bahan yang saya gunakan yaitu laporan keuangan sederhana. Adapun cara-cara untuk membuat Laporan keuangan ini juga sangat mudah yaitu siapkan bukti transaksi, kemudian posting ke jurnal umum selanjutnya di masukan ke buku besar, kemudian masukan neraca. Setelah saya melakukan sosialisasi ini sudah banyak perangkat desa membuat Laporan keuangan karna memang menurut saya pembuatan dengan 1 bahan ini termasuk mudah di dapatkan, dan alhamdulillah perangkat desa di sekitar saya menerima sosialisasi saya.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditenga-tengah masyarakat

diluar kampus dan secara langsung mengidentipikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Kegiatan kkn telah dilaksanakan di desa Desa Pagar Gading Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan kegiatan kkn telah berjalan dengan lancar berkat kerja sama dengan masyarakat Desa Pagar Gading. secara umum program kerja yang telah disusun sebelum pelaksanaan kkn dapat terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang mengakibatkan beberapa program kerja dilaksanakan tidak sesuai perencanaan.

Kegiatan di lokasi kkn dilaksanakan dari tanggal 12 Agustus Sampai 24 September. Selama melaksanakan kkn, bidang sosialisasi dilakukan di kantor desa, bidang pelatihan dilakukan di kantor desa, bidang pendampingan dilakukan dilakukan secara langsung. Terlaksananya program-program yang telah direncanakan memberikan pengaruh dalam jangka panjang. Pengaruh tersebut akan sangat mendukung proses perkembangannya desa tempat KKN. Rutinitas kegiatan sangat penting untuk dipertahankan agar perkembangan desa berjalan dengan pesat.



Gambar 2 Pelatihan dan konsultasi dengan Kepala Desa

KESIMPULAN

Setelah melakukan observasi dan dilanjutkan dengan pembuatan rencana program kerja dengan pelaksanaannya selama ± 30 hari/ 1 bulan, mulai tanggal 12 agustus sampai dengan 24 september, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kurun waktu ± 30 hari saya melaksanakan Kerja Nyata, Kuliah saya mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat desa yaitu Desa Pagar Gading.
2. Semua kegiatan program kerja yang sudah saya lakukan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung dengan membiasakan kebiasaan baiknya.
3. Program kegiatan atau kerja yang di laksanakan berjalan dengan lancar, tercapainya tujuan dan tidak terdapatkendala dalam perlaksanaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih ini disampaikan kepada seluruh perangkat Desa Pagar Gading dan Seluruh Masyarakat Desa Pagar Gading Kabupaten Bengkulu Selatan. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Lapangan yang selama ini telah bersedia dengan tulus dan ikhlas membimbing program

kegiatan kelompok ini dan juga rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. Tidak luput pula ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh anggota kelompok yang telah dapat bekerjasama selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Terlalu banyak kenangan yang sulit untuk kita lupakan. Semoga kita semua dapat menjadi teman dan sahabat selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademik, P. T., Vokasi, P. T., Pendidikan, K., & Teknologi, D. A. N. (2021). *Panduan penelitian 2021*.
- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati. (2019). Determinan yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(1), 29–47.
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1), 1–18.
- Kuliah Kerja Nyata – Universitas Kediri. (n.d.). Retrieved October 20, 2022, from https://unik-kediri.ac.id/?page_id=278
- Pemerintahan Desa Pdf 58660 | Kelola Keuangan Desa 2019 Dikonversi. (n.d.). Retrieved October 20, 2022, from <https://jagomart.net/item/61687/kelola-keuangan-des-2019-dikonversi>
- unmuhbengkulu.net. (n.d.). Retrieved October 20, 2022, from http://ww38.unmuhbengkulu.net/simkkn/index.php?pageNum_Recordset1=108&totalRows_Recordset1=1437&page=infolunasbayar